LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

TRIWULAN I

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 8780990, Fax. (0334) 887461 885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 4 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :

  Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi,informatika, statistik, dan persandian.

- Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandiandanstatistik sektoral;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandiandan statistik sektoral;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan tersebut antara lain :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Triwulan I tahun 2021 terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, yang ditandatangani antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	90%
2	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	85%

Dalam mewujudakan sasaran strategis yang sudah direncanakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai Program dan Anggaran dari progam tersebut pada tahun 2021 yang tertera pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp. 3.500.686.503,-**	**DAU**
2.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Rp. 1.020.651.200,-**	**DAU**
3.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Rp. 185.582.000,-**	**DAU**
4.	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Rp. 3.559.910.110,-**	**DAU & DBHCHT**
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Rp. 68.297.400,-**	**DAU**
JUMLAH		**Rp. 8.777.478.463,-**	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator – indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing – masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK) dan formulir pengukuran Rencana Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan Renja, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja *(performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi *(performance result)* yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021. Sampai saat ini keberhasilan program – program banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome.

1.2 Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah mampu merealisasi secara maksimal seluruh target – target dari sasaran indikator kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2021.

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, capaian dari kedua indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

- Target Triwulan I Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu, telah tercapai sejumlah 17 % dengan rincian sebagai berikut :

  Sistem elektronik terpadu yaitu sistem yang sudah terintegrasi dengan website ppid, website pengaduan, layanan santunan dan akta kematian terpadu, dan website portal berita kabupaten lumajang. Dalam kurun waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, sudah tercapai 9 website perangkat daerah yang terpadu.

  $$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \text{ X } 100\% \Rightarrow \frac{9}{52} \text{ X } 100\% = 17\%$$

- Target Triwulan I Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik, telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :

  $$\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \text{ X } 100\% \Rightarrow \frac{25}{122} \text{ X } 100\% = 20\ \%$$

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 Triwulan I

Adapun capaian kinerja tahun 2021 Triwulan I sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	90%	17%	19%
Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	85%	20%	24%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis dari indikator yang sudah ditetapkan.

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Tribulan I Dengan Realiasasi Kinerja Tahun Lalu (2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	Naik/Turun % Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	19%	19%	0%
Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	24%	30%	6%

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang secara keseluruhan indikator kinerja sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata pada table diatas. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2021 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat capaian kinerja tahun 2021, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami penurunan pada satu indikator yaitu Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik. Sedangkan untuk indicator Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu persentase capaiannya tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2021 pada sasaran Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 30 % pada tahun 2020 turun menjadi 24% pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar 6%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 triwulan I dengan target kinerja jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 triwulan I dengan target kinerja jangka menengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 triwulan I dengan target kinerja jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Target RPJMD	% Realisasi kinerja 2021 Triwulan I s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	90%	19%	21%
Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	85%	30%	35%

Meningkatnya target capaian pada indikator sasaran “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)” selaras dengan tercapainya target capaian pada RPJMD Kabupaten dan juga selaras pada RPJMD Provinsi yaitu Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selanjutnya, dengan meningkatnya target capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik” pada rencana Strategis Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 tentunya juga berimplikasi terhadap peningkatan target capaian pada sasaran RPJMN yaitu Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan

komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

Keberhasilan target sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditentukan. Meskipun akan didahului dengan perubahan belanja, mengingat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala PD masih dapat terjadi. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa salah satu sebab perubahan PK adalah perubahan anggaran atau adanya mutasi pejabat. Proses penyerapan anggaran juga tetap terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan karena target program dan kegiatan tersebut harus tercapai 100% tahun anggaran 2021.

Faktor utama penyebab beberapa permasalahan dalam merealisasikan anggaran adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait upaya penanganan pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Selanjutnya Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi covid-19 sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	1.020.651.200,-	141.339.260,-	13,85%	20%	20,45%	100%	86,15%
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	185.582.000,-	9.324.000,-	5,02%	1 sistem	-	0%	-5,02%
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	68.297.400,-	0,-	0%	20%	-	0%	0%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	3.500.686.503,-	679.775.090,-	19,42 %	100%	50%	50%	30,58%
5	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	568.797.630,-	51.751.054,-	9,09%	20%	2,43%	12,15%	3,06%
		Persentase diseminasi informasi publik	3.031.002.880,-	269.308.385,-	8,88%	100%	33,2%	33,2%	24,32%

6. **Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja**

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait.
2. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim dan Komisi Informasi Jatim.
3. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan dan vendor-vendor bidang TIK.
4. Mengadakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada badan publik tingkat desa.
5. Meningkatkan kapasitas SDM/admin perangkat daerah melalui bimtek.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Tahun 2021 pada tribulan I merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, realisasi keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan pada tribulan I.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, disajikan dalam tabel berikut :

Target Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan InformatikaTahun 2021 Tribulan I

1. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indikator Program	Tahun 2021		
	Target Anggaran	Realisasi Tribulan I	Capaian
1. Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	1.020.651.200,-	141.339.260,-	13,85%

2. *Program Informasi Dan Komunikasi Publik*

Indikator Program	Tahun 2021		
	Target Anggaran	Realisasi Tribulan I	Capaian
1. Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	568.797.630,-	51.751.054,-	9,09%
2. Persentase diseminasi informasi publik	3.031.002.880,-	269.308.385,-	8,88%

3. *Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*

Indikator Program	Tahun 2021		
	Target Anggaran	Realisasi Tribulan I	Capaian
Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	185.582.000,-	9.324.000,-	5,02%

4. *Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*

Indikator Program	Tahun 2021		
	Target Anggaran	Realisasi Tribulan I	Capaian
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	68.297.400,-	0,-	0%

5. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Indikator Program	Tahun 2021		
	Target Anggaran	Realisasi Tribulan I	Capaian
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	3.500.686.503,-	679.775.090,-	19,42 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Strategis periode triwulan I Tahun 2021 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2021 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2021 Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukkan demi perbaikan penyusunan di laporan triwulan berikutnya sangat kami harapkan.

Lumajang, 15 april 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

YOGA PRATOMO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19780910 199602 1 001

LAPORAN KINERJA (LKJ)

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG TRIWULAN I

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 8780990, Fax. (0334) 887461 885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sekretariat merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 5 ayat 2 telah diamanatkan bahwa fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan urusan rumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	98%
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi Umum PD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98%
6	Meningkatnya kualitas fasilitasi pengadaan BMD	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98%
7	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%
8	Meningkatnya kualitas fasilitasi pemeliharaan BMD	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 dari indikator kinerja sebagaimana tabel diatas,

1. Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja}}{\text{Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan}} \text{ X } 100\% =$$

$$= \frac{6}{7} \text{ x } 100\% = 86\ \%$$

Dengan target 100% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

2. Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{4}{5} \text{ x } 100\% = 80\%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

3. Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{0}{2} \text{ x } 100\% = 0\ \%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

4. Presentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD}}{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD yang direncanakan}} \text{ X } 100\% =$$

$$= \frac{0}{2} \text{ x } 100\% = 0\ \%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

5. Presentase fasilitasi Administrasi Umum PD, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Umum PD}}{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Umum PD yang direncanakan}} \text{ X } 100\% =$$

$$= \frac{3}{8} \text{ x } 100\% = 38\ \%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

6. Presentase fasilitasi pengadaan BMD, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi pengadaan BMD}}{\text{Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang direncanakan}} \text{ X } 100\% =$$

$$= \frac{1}{4} \text{ x } 100\% = 25\ \%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

7. Presentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor}}{\text{Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan}} \text{ X } 100\% =$$

$$= \frac{1}{1} \text{ x } 100\% = 100\ \%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

8. Presentase fasilitasi pemeliharaan BMD, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi pemeliharaan BMD}}{\text{Jumlah fasilitasi pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \text{ X } 100\% =$$

$$= \frac{2}{3} \text{ x } 100\% = 67\ \%$$

Dengan target 98% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan.

Maka capaian kinerjanya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi TW I	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	86%	86%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	80%	82%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	98%	0%	0%
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%	0%	0%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi Administrasi Umum PD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98%	38%	39%
6	Meningkatnya kualitas fasilitasi pengadaan BMD	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98%	25%	26%
7	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas fasilitasi pemeliharaan BMD	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98%	67%	68

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Sekretaris Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/Kegiatan/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	13.413.300	790.000	6%	100%	86%	86%	80%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.406.959.775	568.220.783	24%	98%	80%	82%	58%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	9.638.700	0	0%	98%	0%	0%	0%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	83.077.350	884.000	1%	98%	0%	0%	-1%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	303.587.170	14.860.700	5%	98%	38%	39%	34%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	403.076.850	0	0%	98%	25%	26%	26%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	497.744.208	86.154.277	17%	98%	100%	100%	83%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	185.650.000	7.981.330	4%	98%	67%	68	64%

Pada Triwulan I tahun anggaran 2021, terdapat perubahan anggaran untuk menata kembali kebutuhan infrastruktur dasar sebagai sarana mendukung pencapaian target kinerja selama pandemi covid-19, sehingga menyebabkan beberapa capaian target kinerja pada triwulanan I masih belum tercapai. Adapun penyerapan anggaran di Sekretariat masih belum tercapai yaitu pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Persentase fasilitasi pengadaan BMD dikarenakan strategi pencapaian target dimaksud baru diimplementasikan pada triwulan berikutnya tahun anggaran 2021.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Sekretaris adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Melakukan koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta Kasubag Keuangan tentang : a. Penyusunan laporan keuangan semesteran b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan LAKIP c. Penyusunan laporan indeks Kepuasan Masyarakat	Januari 2021
2	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melakukan koordinasi dengan Kasubag keuangan terkait dengan belanja pegawai	Januari 2021 – Desember 2021
3	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Melakukan koordinasi dengan Kasubag keuangan tentang pelaksanaan pembelian barang ATK, Cetakan, dan lain-lain sebagai penunjang pekerjaan	April-Desember 2021
4	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Melakukan koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta Kasubag keuangan terkait dengan Administrasi pegawai	April-Desember 2021

5	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Melakukan koordinasi dengan Kasubag umum dan kepegawaian tentang pelaksanaan pembelian barang ATK, Cetakan, dan lain-lain sebagai penunjang pekerjaan	April-Desember 2021
6	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Melakukan koordinasi dengan Kasubag umum dan kepegawaian tentang pelaksanaan pengadaan barang	April-Desember 2021
7	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Melakukan koordinasi dengan Kasubag umum dan kepegawaian tentang pelaksanaan pembelian barang ATK, Cetakan, dan lain-lain sebagai penunjang pekerjaan	April-Desember 2021
8	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Melakukan koordinasi dengan Kasubag umum dan kepegawaian tentang pelaksanaan pemeliharaan barang	April-Desember 2021

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melakukan koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian terkait kendala yang dihadapi pada proses penyerapan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan barang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Melakukan koordinasi dengan Kasubag Keuangan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam proses Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.
4. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang terkait pengumpulan data yang akan dilakukan untuk bahan Penyusunan Laporan Kinerja.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain ……

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat berdasarkan Peraturan Bupati No 61 tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimane mestinya:
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, secara umum target belum tercapai secara optimal dikarenakan adanya refokusing anggaran terkait kegiatan penanggulangan wabah pandemi covid-19 di Kabupaten Lumajang.
3. Adapun strategi yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
   a. Meminta arahan dari atasan langsung perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja
   b Secara Aktif Koordinasi dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa, dan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika terkait strategi pencapaian target.
   c. Aktif Koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian
   d. Melakukan koordinasi dengan Kasubag Keuangan terkait dengan kendala yang dihadapi.

Mengetahui.
ATASAN LANGSUNG
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

YOGA PRATOMO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP 19780910 199802 1 001

Lumajang, 7 April 2021

SEKRETARIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. SUTAN WARDONO
Pembina Tk. I
NIP. 19650509 199202 1 002

LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TRIWULAN I
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 8780990, Fax. (0334) 887461 885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Subbag. Umum dan Kepegawaian dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Subbag. Umum dan Kepegawaian merupakan salah satu Sub bagian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 6 ayat 1 telah diamanatkan bahwa tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
c) Melaksanakan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
e) Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
f) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
g) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
h) Melaksanakan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;

i) Melaksanakan surat menyurat dan pengarsipan;

j) Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;

k) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

l) Melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. .

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Subbag. Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Kebutuhan BMD.	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 Dokumen
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi penatausahaan BMD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2 Fasilitasi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	2 Fasilitasi
4.	Meningkatnya kualitas laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1 Laporan
5.	Meningkatnya kualitas ASN yang terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	3 ASN
6.	Meningkatnya Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis
7.	Meningkatnya Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis
8.	Meningkatnya Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis
9.	Meningkatnya Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	1 Jenis
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi rakor SKPD.	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
11.	Meningkatnya Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis
12.	Meningkatnya kualitas surat menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 Fasilitasi

13.	Meningkatnya kualitas pembayaran rekening	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening
14.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4 Fasilitasi
15.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	4 Kendaraan
16.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	1 Jenis
17.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, laporan triwulanan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian tercetak dalam bentuk buku laporan.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Kebutuhan BMD.	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi penatausahaan BMD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	2 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%
4.	Meningkatnya kualitas laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	2 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%
5.	Meningkatnya kualitas ASN yang terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	2 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%
6.	Meningkatnya Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	1 Laporan	0 Laporan	20%
7.	Meningkatnya Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 ASN	0 ASN	25%
8.	Meningkatnya Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	1 Jenis	50%

9.	Meningkatnya Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	10 Jenis	0 Jenis	0%
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi rakor SKPD.	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%
11.	Meningkatnya Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Rekening	3 Rekening	100%
12.	Meningkatnya kualitas surat menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	4 Fasilitasi	1 Fasilitasi	25%
13.	Meningkatnya kualitas pembayaran rekening	Jumlah rekening yang dibayar	4 Kendaraan	4 Kendaraan	100%
14.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	1 Jenis	0 Jenis	0%
15.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100%
16.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	100%
17.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	3.725.600,-	0,-	0%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	5.913.100,-	0,-	0%	2 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%	0%
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	3.016.800 ,-	0,-	0%	2 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%	0%
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1.732.250,-	884.000,-	0%	1 Laporan	0 Laporan	0%	0%
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	8.700.000,-	0,-	0%	3 ASN	0 ASN	0%	0%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	. 9.076.870,-	0,-	0%	10 Jenis	2 Jenis	20%	20%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	86.328.000,-	1.903.700,-	2,21%	4 Jenis	1 Jenis	25%	22,79%
8	Penyediaan Barang	Jumlah jenis barang	23.798.775	8.287.000,-	34,72%	2 Jenis	1 Jenis	50%	15,28%

	Cetakan dan Penggandaan	cetakan yang disediakan							
9	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	4.204.200,-	0,-	0%	10 Jenis	0 Jenis	0%	0%
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	4.650.000 ,-	1.350.000,-	29,03%	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%	20,97
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	403.138.450,-	0,-	0%	10 Jenis	0 Jenis	0%	0%
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	3.228.000,-	401.000,-	12,42%	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%	37,58%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	246.428.208,-	27.041.928,-	10,97%	3 Rekening	3 Rekening	100%	89,03%
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	248.088.000,-	58.711.349,-	23,67%	4 Fasilitasi	1 Fasilitasi	25%	1,33%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	138.500.000,-	7.981.330,-	5,76%	4 Kendaraan	4 Kendaraan	100%	94,24%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	6.700.000,-	0,-	0%	1 Jenis	0 Jenis	0%	0%
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40.450.000,-	0,-	0%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%

Program kegiatan triwulan I pada tahun anggaran 2021 beberapa sub kegiatan belum dapat mencapai target yang diharapkan, mengingat pelaksanaan kegiatannya dalam masa pandemi Covid-19, akan tetapi beberapa kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian target kinerja sudah memenuhi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan I tahun anggaran 2021 sedangkan realisasi anggaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Capaian penyerapan anggaran di Triwulan I tahun anggaran 2021 belum merupakan capaian realisasi akhir karena kegiatan masih akan dilakukan pada triwulan selanjutnya selama tahun 2021 dan tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja triwulan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang b. Aktif berkoordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait dengan pemeliharaan barang	Dilakukan pada bulan Januari 2021
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang	Dilakukan pada bulan Januari 2021 -Desember 2021
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Maret 2021
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara	Dilakukan pada bulan April 2021

	Bangunan Kantor	tepat	
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang b. Aktif berkoordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait dengan pemeliharaan barang	Dilakukan pada bulan Januari 2021 -Desember 2021
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang b. Aktif berkoordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait dengan pemeliharaan barang	Dilakukan pada bulan Januari 2021 -Desember 2021
7.	Penyediaan Bahan/Material	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang b. Aktif berkoordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait dengan pemeliharaan barang	Dilakukan pada bulan Januari 2021 -Desember 2021
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Maret 2021
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021

12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021
16.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang b. Aktif berkoordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait dengan pemeliharaan barang	Dilakukan pada bulan Februari 2021
17.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang b. Aktif berkoordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait dengan pemeliharaan barang	Dilakukan pada bulan Januari 2021 - Desember 2021

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala bidang dan staff terkait untuk pengumpulan Data dari masing-masing Bidang
3. Aktif berkoordinasi dengan Kepala Bidang, staff yang terkait serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain ……

…….

…….

…….

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati No 61 tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Didalam pelaksanaannya Subbag. Umum dan Kepegawaian mengacu pada Peraturan Gubernur no 68 tahun 2018.
3. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, sebagian besar target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik.
4. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
   a. Meminta arahan dari atasan langsung perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.
   b. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang.
   c. Aktif berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan dan staff terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan barang. .

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG
SEKRETARIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. SUTAN WARDONO
Pembina Tk. I
NIP. 19650509 199202 1 002

Lumajang, 5 April 2021
KEPALA SUB
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBARI
Penata
NIP. 19631210 199003 1 015

LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

TRIWULAN I
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 8780990, Fax. (0334) 887461 885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Sub Bagian Keuangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan salah satu sub bagian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
c. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas;
e. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
f. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
g. melaksanakan urusan gaji pegawai;
h. melaksanakan administrasi keuangan;
i. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

j. melakukan penyusunan laporan, neraca dan lain-lain;
k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bagian Keuangan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun.	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jenis
2.	Meningkatnya kualitas dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Meningkatnya kualitas dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Meningkatnya kualitas dokumen LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen
5.	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi kinerja PD	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25 ASN
7.	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitasi
8.	Meningkatnya kualitas penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Fasilitasi
9.	Meningkatnya kualitas laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis
10.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis
11.	Meningkatnya fasilitasi ASN yang tersosialisasi peraturan perundangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	10 ASN
12.	Meningkatnya Fasilitasi ASN yang mengikuti Bimtek regulasi kepegawaian	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	11 ASN
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi rakor SKPD.	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2 Fasilitasi

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, dari 3 indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni:

1. Target Triwulan I Jumlah jenis dokumen perencanaan sebanyak 7 Jenis, telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun pada tahun N (2021) = 2 dokumen
2. Target Triwulan I Jumlah dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 Dokumen, telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun pada tahun ke N (2021) = 0 Dokumen
3. Target Triwulan I Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen, telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD pada tahun N (2021) = 1 Dokumen
4. Target Triwulan I Jumlah dokumen LAKIP sebanyak 1 Dokumen telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah dokumen LAKIP yang disusun pada tahun N (2021) = 0 Dokumen
5. Target Triwulan I Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD sebanyak 2 Dokumen telah tercapai dengan formula sebagai berikut: jenis dokumen evaluasi kinerja PD pada Tahun N = 0 Dokumen
6. Target Triwulan I Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan sebanyak 25 ASN, telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan = 25 ASN
7. Target Triwulan I Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN sebanyak 2 Fasilitasi, telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN yang dilaksanakan pada tahun N (2021) = 2 Fasilitasi
8. Target Triwulan I Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD sebanyak 1 Fasilitasi telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan pada tahun N (2021) = 1 Fasilitasi
9. Target Triwulan I Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 jenis telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun pada tahun N (2021) = 1 jenis

10. Target Triwulan I Jumlah Jenis Laporan Keuangan sebanyak 3 jenis, telah tercapai dengan formula sebagai berikut: Jumlah Jenis Laporan Keuangan yang disusun pada tahun N (2021) = 1 Jenis
11. Target Triwulan I Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan sebesar 10 ASN telah tercapai dengan formula sebagai berikut : Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan yang dilaksanakan pada tahun N (2021) Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan pada tahun N (2021) = 1 laporan
12. Target Triwulan I Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian sebesar 11 ASN telah tercapai dengan formula sebagai berikut :
    Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian pada tahun N (2021) = 0 ASN
13. Target Triwulan I Jumlah fasilitasi rakor SKPD, sebanyak 2 Fasilitasi
    Jumlah fasilitasi rakor SKPD yang dilaksanakan pada tahun N (2021) = 1 fasilitasi

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bagian Keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun.	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jenis	2 Jenis	29%
2.	Meningkatnya kualitas dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
3.	Meningkatnya kualitas dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.	Meningkatnya kualitas dokumen LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi kinerja PD	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25 ASN	25 ASN	100%

7.	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%
8.	Meningkatnya kualitas penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100%
9.	Meningkatnya kualitas laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1 jenis	100%
10.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis	1 jenis	33%
11.	Meningkatnya fasilitasi ASN yang tersosialisasi peraturan perundangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	10 ASN	0 ASN	0%
12.	Meningkatnya Fasilitasi ASN yang mengikuti Bimtek regulasi kepegawaian	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	11 ASN	0 ASN	0%
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi rakor SKPD.	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Sub Bagian Keuangan - Triwulanan I

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian	T	R	%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	4.881.600,-	642.000,-	13,15%	7 Jenis	1 Jenis	14%	0,85%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2.569.400,-	0	0%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.476.700,-	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1.732.800,-	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 %
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2.752.800,-	148.000,00	5,38%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	44,62%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	2.338.245.975,-	560.330.623,-	23,96%	25 ASN	25 ASN	100%	76,04%
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	59.502.960,-	7.890.160,-	13,26%	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%	36,74%

8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	4.380.000,-	0	0%	1 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%	0 %
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.313.600,-	0	0%	1 jenis	0 jenis	0%	0 %
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	2.517.240,-	0	0%	3 jenis	1 jenis	33%	33 %
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	40.294.400,-	0	0%	10 ASN	0 ASN	0%	0 %
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	29.333.900,-	0	0%	11 ASN	0 ASN	0%	0 %
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	175.459.200,-	3.320.000,-	1,89%	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%	48,11 %

Program kegiatan triwulan I pada tahun anggaran 2021 beberapa sub kegiatan belum dapat mencapai target yang diharapkan, mengingat pelaksanaan kegiatannya dalam masa pandemi Covid-19, akan tetapi beberapa kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian target kinerja sudah memenuhi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan I tahun anggaran 2021 sedangkan realisasi anggaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Capaian penyerapan anggaran di Triwulan I tahun anggaran 2021 belum merupakan capaian realisasi akhir karena kegiatan masih akan dilakukan pada triwulan selanjutnya selama tahun 2021 dan tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja triwulan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulan I Tahun Anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Strategi yang Digunakan dalam Mencapai Target Kinerja yang telah Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI YANG DIGUNAKAN	PADA BULAN
1.	Jumlah jenis dokumen perencanaan	a. Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja Diskominfo dengan program prioritas dan visi dan misi kepala daerah b. Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja Diskominfo dengan program prioritas dan visi dan misi kepala daerah. c. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang.	Januari 2021
2.	Jumlah dokumen RKA-SKPD	a. Mengerjakan rencana kerja dan anggaran pada kertas kerja b. Aktif berkoordinasi dengan BPKD bidang anggaran c. Mengentry rencana kerja dan anggaran (RKA) pada aplikasi SIPD d. Rekonsiliasi dan pelaporan RKA dengan BPKD bidang anggaran	Januari, Juli, September 2021
3.	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	a. Mengerjakan rencana kerja dan anggaran pada kertas kerja b. Aktif berkoordinasi dengan BPKD bidang anggaran c. Mengentry rencana kerja dan anggaran (RKA) pada aplikasi SIPD d. Rekonsiliasi dan pelaporan RKA dengan BPKD bidang anggaran	September 2021

4.	Jumlah dokumen LAKIP	a. Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja Diskominfo dengan program prioritas dan visi dan misi kepala daerah b. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang	Desember 2021
5.	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	a. Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja Diskominfo dengan program prioritas dan visi dan misi kepala daerah b. Melaksanakan Rapat koordinasi dan meminta data dari masing-masing Bidang	Desember 2021
6.	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Aktif berkoordinasi dengan BPKD bidang anggaran	Januari 2021 - Desember 2021
7.	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Aktif berkoordinasi dengan BPKD bidang anggaran	Januari 2021 - Desember 2021
8.	Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	a. Mengerjakan rencana kerja dan anggaran pada kertas kerja b. Aktif berkoordinasi dengan BPKD bidang anggaran c. Mengentry rencana kerja dan anggaran (RKA) pada aplikasi SIPD d. Rekonsiliasi dan pelaporan RKA dengan BPKD bidang anggaran	Januari 2021 - Desember 2021
9.	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	a. Aktif berkoordinasi dengan BPKD (bidang akuntansi dan bidang Aset) b. Memenuhi jadwal entry dari BPKD terkait laporan keuangan (LRA, LO, LPE, NERACA) c. Mengerjakan catatan atas laporan keuangan (CaLK) d. Melaporkan kepada BPKD	Desember 2021
10.	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	a. Aktif berkoordinasi dengan BPKD (bidang akuntansi dan bidang Aset) b. Memenuhi jadwal entry dari BPKD terkait laporan keuangan (LRA, LO, LPE, NERACA) c. Mengerjakan catatan atas laporan keuangan (CaLK) d. Melaporkan kepada BPKD	Juli 2021
11.	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja dan anggaran Diskominfo dengan program prioritas di bidang cukai dengan visi dan misi kepala daerah	Januari 2021 - Desember 2021

12.	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja dan kegiatan Diskominfo dengan program prioritas dan visi dan misi kepala daerah	Januari 2021 - Desember 2021
13.	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait sinkronisasi rencana kerja dan anggaran Diskominfo dengan program prioritas dan visi dan misi kepala daerah melalui Forum PD	Februari 2021

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga mendapatkan solusi.
b. Melakukan koordinasi internal dengan masing-masing bidang terkait pengumpulan data untuk penyusunan laporan.
c. Aktif berkoordinasi dengan BPKD (Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Aset) terkait penyusunan laporan.
d. Aktif berkoordinasi dengan BAPPEDA terkait penyusunan dokumen perencanaan.
e. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain ……

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan II Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, sebagian besar target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik mengingat pelaksanaan kegiatannya masih dalam masa pandemi Covid-19.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui:
   a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga mendapatkan solusi.
   b. Melakukan koordinasi internal dengan masing-masing bidang terkait pengumpulan data untuk penyusunan laporan.
   c. Aktif berkoordinasi dengan BPKD (Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Aset) terkait penyusunan laporan.
   d. Aktif berkoordinasi dengan BAPPEDA terkait penyusunan laporan dan dokumen perencanaan.
   e. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.

Mengetahui, ATASAN LANGSUNG SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Lumajang, 5 April 2021 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Ir. SUTAN WARDONO Pembina Tk. I NIP. 19650509 199202 1 002	**SRI HARTATIK** Penata NIP.19691003 199803 2 006

LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA BIDANG HUMAS DAN KEMITRAAN MEDIA MASSA

TRIWULAN I

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 8780990, Fax. (0334) 887461 885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bidang Komunikasi Publik merupakan salah satu Bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 9 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa adalah sebagai berikut:

- Tugas :

  Kepala Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, dan pengelolaan media komunikasi publik.
- Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan di bidang kehumasan, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan hubungan media;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan hubungan media;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang kehumasan, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan hubungan media;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kehumasan, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan hubungan media;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kehumasan, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan hubungan media;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Komunikasi Publik dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Publik

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Publik	Persentase diseminasi informasi publik	100%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dari indikator kinerja sebagaimana tabel diatas, dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

- Persentase diseminasi informasi publik

$$\frac{\text{Informasi Publik yang disebarluaskan}}{\text{Informasi Publik yang dihasilkan}} \quad X\ 100\%$$

$$\frac{599}{1800}$$

Dengan demikian maka target 100% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan. Untuk triwulan I ditargetkan sebesar 25%, sehingga 25% target tersebut di *breakdown* secara merata dalam empat triwulanan.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Komunikasi Publik

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Publik	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik	100%	33,2%	33,2%

Dalam realisasi Tribulan I ini pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena informasi yang disajikan berkembang seiring dengan realisasi program-program dan kebijakan pembangunan di daerah.

Berikut ini pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai pagu dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa Tahun 2020 - Triwulanan I

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Komunikasi Publik	3.031.002.880	269.308.385	8,88%	100%	33,2%	33,2%	24,32%

Capaian target kinerja untuk Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa di Triwulan I telah tercapai 30,32%, dan itu telah melebihi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan I tahun anggaran 2021. Kemudian, untuk realisasasi penyerapan anggaran di Triwulan I 2021 telah mencapai 8,88% dari pagu Rp 3.031.002.880.

Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa terhadap upaya pencapaian 1 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Diseminasi Informasi Publik	Mengoptimalkan komunikasi dengan OPD lain, admin media sosial dan tim dokumentasi serta peningkatan kinerja, bekerjasama dengan media	Dilakukan mulai awal Januari s.d. Maret 2021.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
3. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;
4. Aktif berkoordinasi dengan tim media sosial dan dokumentasi;
5. Aktif berkoordinasi dengan tim media

6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan yang berkelanjutan kepada OPD terkait.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain ……

……

……

……

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jatim dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 1 target tersebut melalui:
   a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
   b. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
   c. Aktif berkoordinasi dengan Kementrian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;
   d. Aktif berkoordinasi dengan tim media sosial dan dokumentasi;
   e. Aktif berkoordinasi dengan komunitas sosial, seni dan budaya, LSM dan menampung aspirasi masyarakat.
   f. Bekerjasama dengan media

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

YOGA PRATOMO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19780910 199802 1 001

Lumajang, 12 April 2021

KEPALA BIDANG HUMAS DAN KEMITRAAN MEDIA MASSA

YULI ANNISA HARYONO, SST.Par
Penata Tk. I
NIP. 19810712 201001 2 024

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I

SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN
2021

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan I sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik merupakan salah satu Seksi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

- Tugas :

  Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- Fungsi :

a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi publik;

b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik;

c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik;

d. Melaksanakan pengelolaan pusat media, media cetak, media daring, media luar ruang dan media sosial milik Pemerintah Daerah;

e. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Pimpinan Daerah, Pembangunan dan Potensi Daerah;

f. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;

g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik;

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah media publik yang dikelola	Jumlah media publik yang dikelola	6 media publik
2.	Meningkatnya Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	6 konten

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dari indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni:

- Triwulan I jumlah media publik yang dikelola yakni berjumlah 6 media publik.
- Triwulan I jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan yakni berjumlah 5 konten

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jumlah media publik yang dikelola	Jumlah media publik yang dikelola	6 media publik	5 media publik	83%
Meningkatnya Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	6 konten	5 konten	83%

Dalam realisasi Tribulan I ini pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas mendekati target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena koordinasi antar Perangkat Daerah terkait yang lebih intens dalam berbagi data/informasi untuk disebarluaskan, melalui 5 media publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya media center, media luar ruang, media sosial, media cetak dan anjungan informasi. Sedangkan untuk jenis konten informasi yang dipublikasikan terdiri dari 5 konten yakni foto, infografis, desain grafis, video, podcast/vidcon.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik

Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	222.462.000	48.896.000	21,98 %	6 konten	5 konten	83%	61,02%
2	Meningkatnya Jumlah media publik yang dikelola	Jumlah media publik yang dikelola	302.113.000	37.371.001	12,37%	6 media publik	5 media publik	83%	70,63%

Sisa anggaran pada 2 kegiatan yang target kinerjanya telah tercapai, tidak lantas disimpulkan bahwa anggaran tersebut tidak akan terserap lagi, karena proses penyerapan atas anggaran pada 3 kegiatan tersebut masih tetap berjalan.

Proses penyerapan anggaran juga tetap terjadi pada kegiatan penyusunan laporan kinerja, mengingat pada kegiatan ini sebenarnya merupakan upaya mengakomodir sebagian dari proses penilaian ataupun evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten. Sehingga tentunya direncanakan penyerapan anggarannya hingga di Bulan Desember 2021.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 di atas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di triwulanan I Tahun Anggaran 2021, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir Tahun Anggaran dalam laporan kinerja tahunan

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik terhadap upaya pencapaian 2 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah media publik yang dikelola	Mengoptimalkan komunikasi dengan OPD lain, admin media sosial dan tim dokumentasi.	Dilakukan mulai awal Januari s.d. Maret 2021.
2.	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan		

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;

3. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;
4. Aktif berkoordinasi dengan tim media sosial dan dokumentasi.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Publik berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui:
   a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
   b. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
   c. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;
   d. Aktif berkoordinasi dengan tim media sosial dan dokumentasi.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

YULI ANNISA HARYONO, SST Par
Penata Tk. I
NIP. 19810712 201001 2 024

Lumajang, 05 April 2021

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

EDI MULYADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19660607 199403 1 015

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I

SEKSI LAYANAN HUBUNGAN MEDIA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN
2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Seksi Layanan Hubungan Media sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan Tahun Anggaran 2021. Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Layanan Hubungan Media merupakan salah satu Seksi dibawah Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 telah diamanatkan bahwa tugas Seksi Layanan Hubungan Media adalah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal kemitraan media massa;
2. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan kemitraan media massa;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal kemitraan media massa;
4. Menyelenggarakan pembinaan media massa dan sosialisasi ketentuan dibidang pers;
5. Melaksanakan kerjasama dengan media massa;

6. Mengkliping media cetak kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan menyajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kemitraan media massa;
8. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Kepala Seksi Layanan Hubungan Media adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Layanan Hubungan Media

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya berita melalui media massa.	Jumlah berita/ informasi yang disebarluaskan	500 berita

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu Bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2021, dengan target 125 berita yang telah tercapai dibagi menjadi media massa; cetak harian 19,44%, siber 29,26%, radio 26,31 %, televisi 0. Adapun untuk media mingguan tidak menjadi target penyebaran konten informasi Pemerintahan Kabupaten Lumajang disebabkan karena media cetak mingguan tidak mendapat alokasi anggaran publikasi program kerja/kegiatan Pemerintah Daerah di Tahun 2021.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Layanan Hubungan Media

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Berita yang tersebar dalam media massa yang	1. Jumlah berita yang dimuat dalam media massa harian yang bekerjasama dengan	180 berita	35 berita	19,44 %

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
sudah terdaftar bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang	Dinas Kominfo			
	2. Jumlah berita yang dimuat dalam media massa online yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo	188 berita	55 konten	29,26 %
	3. Jumlah berita yang dimuat dalam media massa mingguan yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo	0 berita	0 berita	0 %
	4. Jumlah berita yang dimuat dalam media massa elektronik (radio) yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo	38 berita	10 berita	26,31 %
	5. Jumlah berita yang dimuat dalam media massa elektronik (TV) yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo	4 berita	0	0 %
JUMLAH		500 berita	100 berita	20 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Layanan Hubungan Media Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1.	Meningkatnya Jumlah berita yang dipublikasikan	Jumlah berita yang dipublikasikan	965.328.380,-	12.447.730,-	1,29 %	500 berita	100 berita	20 %	18,71%
2.	Meningkatnya Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa	Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa (DBHCHT)	526.009.900,-	0,-	0%	4 kali	0,-	0%	0%
3.	Meningkatnya Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	473.003.200,-	43.645.000,-	9,23%	24 Laporan	12 Laporan	50%	40,77%

Sisa anggaran pada 3 kegiatan yang target kinerjanya telah tercapai, tidak lantas disimpulkan bahwa anggaran tersebut tidak akan terserap lagi, karena proses penyerapan atas anggaran pada 3 kegiatan tersebut masih tetap berjalan. Untuk kegiatan fasilitasi penelitian perjanjian kinerja misalnya, kegiatan ini masih tetap akan berjalan, meskipun akan didahului dengan perubahan belanja, mengingat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD masih dapat terjadi. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa salah satu sebab perubahan PK adalah perubahan anggaran atau adanya mutasi pejabat.

Proses penyerapan anggaran juga tetap terjadi pada kegiatan penyusunan laporan kinerja, mengingat pada kegiatan ini sebenarnya merupakan upaya mengakomodir sebagian dari proses penilaian ataupun evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten. Sehingga tentunya direncanakan penyerapan anggarannya hingga di Bulan Desember 2021.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 di atas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di triwulanan I Tahun Anggaran 2021, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir Tahun Anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Target kinerja sudah tercapai sesuai target triwulan I, keadaan tersebut akan terus dipertahankan sesuai dengan jadwal sampai selesai di Bulan Desember 2021. Adapun upaya yang akan dilakukan mempertahankan capaian target tersebut oleh Seksi Layanan Hubungan Media sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Meningkatnya partisipasi media massa untuk memasang/menampilkan konten pemerintahan dalam media massa yang sudah terdaftar bekerjasama	Mengidentifikasi moment yang akan terjadi untuk dijadikan advertorial untuk media massa dan membuat surat pesanan untuk masing-masing media	Dilakukan pada Bulan Januari s/d Maret 2021.

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kemitraan Media Massa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 1 target adalah melalui:
   a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
   b. Aktif berkoordinasi seluruh perusahaan media massa/wartawan terkait permasalahan yang dihadapi bersama.
   c. Aktif berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas Kominfo terkait dengan ketersediaan anggaran kerjasama dengan media massa.
   d. Aktif berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kominfo terkait dengan media massa yang melakukan pengadaan langsung.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

YULI ANNISA HARYONO, SST. Par
Penata Tingkat I
NIP. 19810712 201001 2 024

Lumajang, 05 April 2021

KEPALA SEKSI KEMITRAAN MEDIA MASSA

MUSTAQIM, SHI
Penata
NIP. 19840518 20110 1 014

LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA SEKSI KEHUMASAN
TRIWULAN I
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 8780990, Fax. (0334) 887461 885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Seksi Kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik sebagai salah satu kelas jabatan pada Eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan I sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I Tahun Anggaran 2021. Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik merupakan salah satu seksi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Seksi Kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan peliputan, serta penyediaan berita lintas sektoral;
   menyusun rencana dan program kerja dalam hal pelaksanaan peliputan, serta penyediaan konten lintas sektoral;
b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria
   penyelenggaraan kebijakan dalam hal pelaksanaan peliputan, serta penyediaan konten lintas sektoral;
c. mempersiapkan rencana kehumasan;
d. melaksanakan peliputan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
e. menyusun berita penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
f. menyajikan berita penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada publik melalui radio dan portal berita milik pemerintah;

g. melaksanakan pengelolaan radio milik Pemerintah Kabupaten Lumajang; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur radio milik Pemerintah Kabupaten Lumajang:
h. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
i. kebijakan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi serta penyediaan konten lintas sektoral;
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai Langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kehumasan dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kehumasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Meningkatnya Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
2.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif	Meningkatnya Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif
		Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	Meningkatnya Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dari indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni:

- Triwulan I Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif
- Triwulan I Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang

Tabel 2.2

Capaian Kinerja kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	12 agenda	0	0 %

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif	500 partisipan	120	24 %
	Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	50 komunitas	3	6 %

Dalam realisasi Tribulan I ini pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas sudah melebihi target yang sudah ditetapkan karena informasi yang disajikan berkembang seiring dengan banyaknya peristiwa yang terjadi pada situasi pandemi Covid-19 dan penyesuaian realisasi program–program dan kebijakan pembangunan di daerah.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik

Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	142.320.000	26.700.000	0 %	12 agenda	0 agenda	0 %	%
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif	399.766.400	9.915.000	2,5 %	500 partisipan	120 partisipan	24 %	- 1 %
		Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang		3.540.000	0,9 %	50 komunitas	3 komunitas	6 %	- 19 %

Capaian target kinerja belum dapat dicapai pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 karena terjadi penyesuaian-penyesuaian anggaran terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pandemi Covid-19. Sedangkan realisasi anggaran yang masih jauh dari pagu disebabkan oleh sedikitnya capaian penyerapan anggaran Tahun 2021 tersebut bukan merupakan capaian realisasi akhir, adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan I Tahun Anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi Kehumasan terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja
yang telah tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1. Mengoptimalkan komunikasi dengan PD lain. 2. Memerintahkan tim peliput agar selalu menulis berita dalam setiap kesempatan, baik dalam kegiatan bertugas ataupun dalam keadaan tidak bertugas. 3. Memberikan motivasi berupa moto "*One Day One News or More*" kepada tim peliput dan reporter.	Dilakukan mulai awal Januari s.d. akhir Desember 2021.
2.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1. Mengoptimalkan komunikasi dengan PD lain untuk memperoleh informasi mengenai mitra di masing-masi PD. 2. Gencar melakukan promosi ke masyarakat melalui channel-chanel yang ada. 3. Menjalin komunikasi yang baik dengan komunitas yang ada dan terus berupaya mengembangkan kemitraan.	Dilakukan mulai awal Januari s.d. akhir Desember 2021.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
3. Aktif berkoordinasi dengan Kementrian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;
4. Aktif berkoordinasi dengan tim media sosial dan dokumentasi.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain ……

…….

…….

…….

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi Publik berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jatim dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

1. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik.
2. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 1 target adalah melalui:
   a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
   b. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
   c. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;
   d. Aktif berkoordinasi dengan tim media sosial dan dokumentasi.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG HUMAS DAN
KEMITRAAN MEDIA MASSA

Yuli Annisa Haryono SST.Par.
Penata Tk I
NIP. 19810712 201001 2 024

Lumajang, 02 April 2021

KEPALA SEKSI KEHUMASAN

Joko Dwi Laksono, S.Sos., MM
Penata
NIP. 19800229 201001 1 011

LAPORAN KINERJA
BIDANG INFORMASI PUBLIK
TRIWULANAN I

TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP. 0334-8780990

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja mengatur bahwa laporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim, yang adalah laporan kinerja triwulanan, dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja triwulanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), disampaikan secara berjenjang, diantaranya dari Pejabat Eselon III kepada Pejabat Eselon II.

Bidang Informasi Publik adalah satu bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan persandian, yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pasal 3 ayat (1) huruf b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Informasi Publik, mempunyai fungsi :

1. . Perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan persandian;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan persandian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan persandian;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan persandian;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinasKomunikasi dan Informatika.

Secara organisasi bidang ini dikepalai oleh Kepala Bidang. Adapun secara eselonering Kepala Bidang Informasi Publik adalah pejabat eselon III/b. Tahun Anggaran 2021 telah berjalan selama 1 triwulan, dengan demikain maka Kepala Bidang Informasi Publik berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan I untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Laporan kinerja didasarkan pada laporan Kinerja Triwulan I dari Kepala Seksi yang secara hirarki berada dibawah Kepala Bidang Informasi Publik, yakni Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Kepala Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Persandian

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Bidang Informasi Publik dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Informasi Publik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	80 %
2	Meningkatnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	90 %

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2021 dari indikator kinerja sebagaimana tabel diatas, dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

1. Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat:

$$\frac{\text{Jumlah KIM yang memiliki Blog}}{\text{Jumlah Kelurahan dan Desa}} \times 100\%$$

Pada triwulan I ditargetkan capaian sebesar 20 % dari keseluruhan target tahun 2021. Untuk indikator pada program ini pada prinsipnya mencakup komponen jumlah forum PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, dimana capaiannya pada triwulan I sebesar 14,53%, dan jumlah KIM yang memiliki blog dengan capaian target triwulan I sebesar 2.43%. Namun demikian dalam indikator kinerja individu yang telah ditetapkan lebih menitikberatkan pengembangan KIM sebagai indikator kinerja. Existing jumlah KIM yang memiliki blog sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 sebanyak 5 KIM.

2. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Dalam rencana aksi pada triwulan II ditargetkan sebesar 17%, dengan formula penghitungan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\ \%$$

Jumlah seluruh perangkat daerah adalah 52 OPD (terdiri dari sekretariat daerah, inspektorat, sekretariat DPRD, 22 Dinas, 6 Badan, dan 21 Kecamatan), dengan target 90 % di tahun 2021, maka pada triwulan 1 tahun 2021 tercapai 0%.

Capaian kinerjanya tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	20%	2.43%	12.15%
Meningkatnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	20%	0%	0%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome
Bidang Informasi Publik Tahun 2021 - Triwulan I

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2021	Anggaran		Kinerja			Efisiensi
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (%)	Capaian	
1.	Meningkatnya cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	568.797.630	51.751.054	9.09%	20%	2.43%	12.15%	3.06%
2	Meningkatnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	50.100.000	0	0	20%	0%	0%	0%

Capaian penyerapan anggaran di Triwulan I merupakan realisasi capaian awal pada tahun 2021.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja untuk 2 (dua) sasaran program selama triwulan I, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bidang Informasi terhadap pencapaian 2 (dua) target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Pembinaan KIM melalui berbagi saluran kornunikasi	Setiap bulan
2.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	proses administrasi yang menggunakan sandi secara cepat, aman dan bertanggung jawab	Setiap bulan

Terkait dengat target kinerja yang belum tercapai, disebabkan karena masih dalam pandemic covid-19 serta terjadi *re-focusing* anggaran untuk seluruh program. Selanjutnya pada triwulan I tahun anggaran 2021 tentunya masih dapat dilakukan perbaikan pencapaian kinerja pada triwulanan berikutnya.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja program;
2. Koordinasi intensif dengan stakeholder pendukung kegiatan yang akan berkontribusi dalam pencapaian target kinerja program secara akumulatif.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jatim dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, beberapa target belum dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat dalam masa pandemi Covid-19;
3. Adapun strategi yang akan dilakukan agar target dapat dicapai, melalui:
   a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
   b. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
   c. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim;

Mengetahui, ATASAN LANGSUNG	Lumajang, 9 April 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK
YOGA PRATOMO, S.STP Pembina Tk. I NIP. 19780910 199802 1 001	**BEKTI SAWIJI, M.Pd** Penata Tk. I NIP. 19751117 200501 1 006

LAPORAN KINERJA SEKSI
KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
BIDANG INFORMASI PUBLIK

TRIWULANAN I

TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATENLUMAJANG
JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP.0334-8780990

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon II berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu. Kepala Seksi Kemitraan Pemangku Kepentingan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Kemitraan Pemangku Kepentingan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud. juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Kemitraan Pemangku Kepentingan (KPK) adalah salah satu seksi pada Bidang Informasi Publik (BIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Seksi KPK ini dibentuk oleh Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Seksi Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf b angka2, mempunyai tugas .

a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
d. Melakukan pembinaan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan diantaranya kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional dan pertunjukan rakyat, komunitas pembuat konten positif, dan kelompok strategis;
e. Mendukung pemangku kepentingan untuk melaksanakan diseminasi informasi dengan menggunakan berbagai media;
f. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur media informasi pemangku kepentingan milik Pemerintah Daerah;
g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai Langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Seksi Komblik telah memiliki kesepakatan dengan pemberi kerja dalam hal ini Kepala Bidang informasi dan Komunikasi Publik yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Poin dari perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama yaitu Meningkatkan jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang memiliki Blog dan meningkatnya jumlah Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT . Perjanjian kinerja ini telah ditandatangani oleh kepala seksi Kemitraan Pemangku Kepentingan dan Kepala Bidang informasi Publik tahun anggaran 2021.

Perjanjian kinerja ini juga memuat alokasi anggaran. Pada tahun 2021 ini, anggaran pada seksi KPK adalah sebesar Rp. 323.999.830,- (tiga ratus dua puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog dan Peningkatan Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan Perundang Undangan di Bidang Cukai (DBHCHT). Anggaran tersebut sudah tercantum dalam RKA Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenLumajang.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kemitraan Pemangku Kepentingan dengan Kepala Bidang Informasi Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Kepala Seksi Kemitraan dangan Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	41 KIM
2	Meningkatnya jumlah Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	550 orang

2.1. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Januari.d 31 Maret 2021, dari indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni :

- Target Triwulan I jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog sebanyak 10 KIM telah tercapai sebanyak 5 KIM Desa/Kelurahan yang sudah memiliki blog. Adapaun indikator Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog masih tercapai sebesar 50 % serta target triwullan I jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundan undangan dibidang cakai (DBHCHT) sebanyak 137 peserta telah tercapai sebanyak 50 orang. Adapun indikator jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundan undangan dibidang cakai (DBHCHT) baru tercapai sebesar 36,5%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Target s/d Triwulan ini	Realisasi Triwulanan								Realisasi s/d Triwulan ini	Capaian (%)
			I	II	III	IV		I	(%)	II	(%)	III	%	IV	%		
1	Meningkatnya Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Memiliki Blog	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	10 KIM				41 KIM	5 KIM	50							5 KIM	50
2.	Meningkatnya jumlah sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai (DBHCHT)	137 orang					50 orang	36,50							50 orang	36,50

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

***Cost per outcome* Seksi Komunikasi Publik Tahun 2020**
sampai dengan Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	93.670.000	12.664.500	13,52%	10 KIM	5 KIM	50%	36,48 %
2	Meningkatnya jumlah sosialisasi ketetntuan perundan undangan di bidang cukai	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	323.999.830	18.366.230	5,66%	137 orang	50 orang	36.50%	30,84%

Keterangan:

Rumus Perhitungan Efisiensi= Kinerja-Capaian

Capaian target kinerja **sampai dengan** Triwulan I masih belum memenuhi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan I tahun anggaran 2021. Pada Triwulan I ini sudah dilakukan pembinaan anggota KIM, rakor dengan ketua KIM perwakilan kecamatan, pemberian uang transportasi bagi kontributor berita, serta pemberian penghargaan kepada pewarta warga, serta telah dilaksanakan sosialisai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada sebanyak 50 peserta.

2.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi KPK terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	a. Melakukan rakor sosialisasi tentang program kerja seksi KPK kepada perwakilan KIM kecamatan. b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KIM Desa, c. Pemberian uang transportasi kepada contributor berita. d. Melakukan Bimtek Pembinaan kepada Ketua/anggota KIM e. Memberikan penghargaan kepada pewarta warga	Dilakukan pada bulan Januari - Maret 2021
2.	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	a. Menjalin komunikasi dengan instansi terkait b. Berkoordinasi dengan KPPBC TMP C Probolinggo terkait agenda penjadwalan Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai terkait agenda dan Desain Media Luar Ruang c. Menjalin komunkasi dengan kelompok pemangku kepentingan d. Menjalin komunikasi dengan komunitas, pedagang rokok, Camat, Tomas, Agen Rokok, RT/RW, SKD, PKK, dan komunitas lainnya.	Dilakukan pada bulan Januari - Maret 2021

2.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait penyelenggarakan Sosialisasi tentang Peran dan Fungsi KIM kepada masyarakat Lumajang.
3. Aktif berkoordinasi dengan, KPP-BC TMP C Probolinggo, perangkat daerah, kelompok kepentingan, komunitas, camat, Tokoh masyarakat, pedagang dan/agen rokok, RT/RW, SKD, dan komunitas lainnya terkait penyelenggarakan Sosialisasi ketetntuan perundang-undangan dibidang cukai.
4. Melakukan pendampingan pembuatan Blog bagi KIM yang belum memilikinya.

2.4. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [x] Laporan sudah baik Laporan
- [ ] kurang baik Laporan segera
- [ ] diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja sudah berhasil diwujudkan dengan baik. Target Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memilik blog sudah mencapai 100% pada triwulan IV sudah dilakukan rakor sosialisasi dengan perwakilan KIM Kecamatan, pembinaan kepada anggota KIM Desa, serta penganugerahan kepada pewarta warga terbaik.
3. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengejar pencapaian target adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   A. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi,
   B. Aktif berkoordinasi dengan mengadakan pertemuan intensif dengan seluruh anggota KIM Desa/Kelurahan serta dengan perangkat daerah terkait;
   C. Menyelenggarakan sosialisasi tentang peran dan fungsi KIM kepada masyarakat Lumajang
   D. Melakukan percepatan pembentukan KIM Desa/Kelurahan se Kabupaten Lumajang sesuai denga Perbub Nomor 19 Tahun 2019 di seluruah Kecamatan se-Kabupaten Lumajang.

Mengetahui,

ATASAN LANGSUNG
KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK

BEKTI SAWIJI, M.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19751711 200501 1 006

Lumajang, 5 April 2021

KEPALA SEKSI KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

IDRUS, A.Md
Penata III/c
NIP. 19681009 199202 1 003

LAPORAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIDANG INFORMASI PUBLIK
TRIWULANAN I

TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP. 0334-8780990

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Pelayanan Informasi Publik merupakan salah satu Seksi dibawah Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 ayat 1 telah diamanatkan bahwa tugas Seksi Pelayanan Informasi Publik adalah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pengelolaan informasi publik
b. menyusun rencana dan program kerja dalam hal pelayanan informasi publik;
c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal Pelayanan Informasi Publik;
d. menyelenggarakan layanan permohonan informasi publik serta sengketa informasi;
e. menyelenggarakan pembinaan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten

Lumajang

f. menyelenggarakan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Desa/Kelurahan;

g. melaksanakan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Desa/Kelurahan;

h. melaksanakan pemantauan Isu Publik dan aduan masyarakat di sarana pengaduan publik;

i. memantau,mengavaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik;

j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenaia langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik; dan

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Informasi Publik dengan Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik.

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah forum PPID yang dibina	Jumlah Forum PPID yang dibina	172 PPID
2	Meningkatnya Jumlah saluran opini yang dipantau	Jumlah saluran opini yang dipantau	3 saluran

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam perjanjian kinerja di atas, dalam 1 (satu) tahun telah ditetapkan target sebanyak 71 PPID Pembantu yang dibina dan 101 PPID Desa. Dari indikator kinerja di atas, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

- Triwulan I dilakukan kegiatan Pembinaan Forum PPID Pembantu dan Pembinaan PPID Desa.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capai an
Meningkatnya Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	50 PPID	25	50 %
Meningkatnya Jumlah saluran opini yang dipantau	Jumlah saluran opini yang dipantau	1 saluran opini yang dipantau	1 saluran opini yang dipantau	100 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai kegiatan- kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Rp. 119.147.800,	11.800.324	9,90	50 PPID	25 PPID	50 %	%
2	Meningkatnya Jumlah saluran opini yang dipantau	Jumlah saluran opini yang dipantau	Rp. 31.980.000	Rp. 8.920.000	27,89 %	1 saluran opini yang dipantau	1 saluran opini yang dipantau	100%	%

Keterangan:
Rumus Penghitungan Efisiensi: Kinerja-Capaian

Capaian target kinerja pada Triwulanan I tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Pelayanan Informasi Publik, pada sub pembinaan PPID Pembantu dan PPID desa yang ditargetkan sebanyak 50 PPID, telah terealisasi sebanyak 25 PPID, artinya telah tercapai 50%. Sedangkan kegiatan pemantauan sarana opini publik ada 1 saluran yang dipantau. Kegiatan pemantauan opini publik pada triwulan I ini telah tercapai sebesar 100%.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi Pelayanan Informasi Publik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	a. Menjalin komunikasi lebih intensif dengan instansi terkait selaku PPID Utama dengan PPID Pembantu dan PPID Desa b. Menjalin kerjasama antar Pemerintah Kabupaten lain dalam peningkatan kapasitas PPID Desa	Dilakukan mulai awal Januari hingga akhir Maret 2021.

2.	Meningkatnya Jumlah saluran opini yang dipantau	a. Menjalin komunikasi dengan instansi terkait b.Mengadakan rakor dengan admin OPD terkait	Dilakukan mulai awal Januari hingga akhir Maret 2021.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Aktif berkoordinasi dengan admin PPID Pembantu serta melakukan pembinaan kepada PPID Desa.
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan para admin yang menangani laporan di masing – masing OPD untuk penyelesian masalah yang dilaporkan oleh publik.
3. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Informasi Publik berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun perlu untuk ditingkatkan;
2. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengejar pencapaian target adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dan PPID Desa;
   b. Menjalin komunikasi yang baik dengan para admin yang menangani laporan di masing – masing OPD untuk penyelesian masalah yang dilaporkan oleh publik.

Mengetahui,

ATASAN LANGSUNG
KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK

BEKTI SAWIJI, M.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19751711 200501 1 006

Lumajang, 5 April 2021

KEPALA SEKSI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

RIDWAN EFFENDY, S.Pd
Penata III/c
NIP. 19820411 200903 1 002

LAPORAN KINERJA
SEKSI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
BIDANG INFORMASI PUBLIK TRIWULANAN I

TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATENLUMAJANG
JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP.0334-8780990

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Seksi Persandian sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerjadimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Persandian dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaananggaran.

Seksi Penyelenggaraan Persandian merupakan salah satu Seksi Penyelenggaraan Persandian Bidang Informasi Publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati No 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 1 ayat 14 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Seksi PenyelnggaraanPersandianKeamanan adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian;
2. menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan persandian;
3. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan persandian;
4. menyusun tata kelola keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi di lingkup pemerintah Daerah ;
5. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan Informasi di Kabupaten Lumajang;
6. menyusun teknis Operasional pengelolaan komunikasi Sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkup propins;

7. melaksankan pengelolaan Informasi berklasifikas melalui pengklasifikasian dan keamanan Informasi milik pemerintah daerah;
8. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
9. melaksankan pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat persandian;
10. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah,
11. memantau dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan persandian;
12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik: dan
13. melaksankan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam hal ini Seksi Penyelenggaraan Persandian telah memiliki kesepakatan dengan pemberi kerja dalam hal ini Kepala Bidang Informasi Publik yang tertuang dalam perjanjiankinerja.

Poin dan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama yaitu Meningkatkan Pengelolaan perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam telekomunikasi. Perjanjian kinerja ini telah ditandatangani oleh kepala seksi Penyelenggaraan Persandian dan Kepala Bidang Informasi Publik pada awal tahun anggaran 2021.

Perjanjian kinerja ini juga memuat alokasi anggaran. Pada tahun 2021 ini, anggaran pada seksi Persandian adalah sebesar Rp. 68.297.400,- (Enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tuju ribu empat ratus rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, serta kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut sudah tercantum dalam RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyelenggaraan Persandian dengan Kepala Bidang Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Persandian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah informasi yang bersandi	Jumlah informasi yang bersandi	375 informasi
2.	Meningkatnya Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	3 jenis

2.2. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Persandian

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dari indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Target s/d Triwulan Ini	Realisasi Triwulanan								Realisasi s/d Triwulan Ini	Capaian (%)
		I	II	III	IV		I	(%)	II	(%)	III	%	IV	%		
Meningkatnya Jumlah informasi yang bersandi	Jumlah informasi yang bersandi	93					25	26,88							25 informasi	26,8%
Meningkatnya Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	1					1	100							1 ,enis	100%

- Target Triwulan I jumlah informasi yang bersandi sebesar 93 informasi, telah terrealisasi sebesar 25 informasi atau sekitar 26,88 %. Sedangkan jumlah jaring Komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi target triwulan I sejumlah 1, telah terealisasi I sebanyak 1 atau sekitar 100%.

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran

dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
***Cost per outcome* Seksi Persandian Tahun 2020**
sampai denganTriwulanan IV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Jumlah informasi yang bersandi	Jumlah informasi yang bersandi	Rp. 46.020.000	0	0	93	25	26,88	26.88%
2	Meningkatnya Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	Rp. 22.277.400	0	0	1	1	100%	100%

Keterangan:

Penghitungan Efisiensi= Capaian Kinerja – Capaian Anggaran

Capaian target kinerja sampai dengan Triwulan I belum memenuhi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan I tahun anggaran 2021. Capaian penyerapan anggaran di Triwulanan I tahun anggaran 2021 belum tercapai dikarenakan adanya *re-focusing* untuk seluruh anggaran.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021. maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi Persandian terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah informasi yang bersandi	a. Mengadakan atau melakukan konsultasi dengan BSSN melalui telpon dan email yang ditetapkan BSSN (Badan Seiber dan SandiNegara).	Dilakukan mulai awal Januari s.d. Maret 2021.
2.	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	b. Aktif berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi khususnya bidang Keamanan Informasi dan Persandian. c. Aktif berkoordinasi dengan Bidang Atau Seksi Persandian se-Indonesia Jawa Timur Khususnya	

	d. Pertemuan intensif dengan Kabupaten se Jawa Timur Khusus Keamanan Persandian yang diselenggarakan Diskominfo ProfinsiJawa Timur.	

2.4. RENCANA TINDAKLANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga adasolusi.
2. Aktif berkoordinasi dengan BSSN
3. Aktif berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi
4. Aktif berkoordinasi dengan Bidang atau seksi keamanan Informasi Kabupaten lain di wilayah Jawa Timur.
5. Mengikuti Bimtek yang diselenggarakan Diskominfo Profinsi atau BSSN.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 43 Tahun 2017 tentang pedoman lata naskah Dinas di lingkungan pemkab Lumajang, UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 Informasi Publik Yang dikecualikan (RAHASIA). Dasar Hukum indeks KAMI UU. Nomor 8 tahun 2008 tentang ITE. Penyelenggaraan Urusan Persandian di daerah sesuai UU no.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Permenhan no.57 Tahun 2014 Tentang Pedoman stategis Pertahanan NIR MILITER Peraturan Lembaga Sandi Negara no.10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara no.14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Komunikas Sandi, Surat Edaran Menkominfo no.05/SE/M.KOMINFO/07/2011. Permen Kominfo no.4 tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamann Informasi dan Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Bupati Lumajang Peraturan Bupati No 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui:
   a. Melakukan konsultasi dengan BSSN lewat telepon atau email BSSN
   b. Aktif berkoordinasi dengan BSSN dan Diskominfo Provinsi khusus bidang Keamanan Informasi dan Persandian
   c. Aktif berkoordinasi dengan Bidang atau seksi keamanan Informasi Kabupaten lain di wilayah Jawa Timur.
   d. Pertemuan intensif dengan Kabupaten se- Jawa Timur Khusus Keamanan Persandian yang diselenggarakan Diskominfo Provinsi JawaTimur.

Mengetahui	Lumajang, 5 April 2021
ATASAN LANGSUNG	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK	PERSANDIAN
BEKTI SAWIJI, M.Pd	**AGUS SUSWANTO**
Penata Tingkat I	Penata III/c
NIP. 19751711 200501 1 006	NIP. 196660814 199403 1 010

Laporan Kinerja (LKJ)
Triwulan I 2021

Bidang Aplikasi Informatika

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 yakni Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Triwulanan kepada Pejabat Eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bidang Aplikasi Informatika merupakan salah satu Bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :

  Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Aplikasi Informatika.
- Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;

2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II
AKUNTABILITAS INERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Aplikasi Informatika dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Aplikasi Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK yang terpadu.	1. Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa	90%
		2. Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dari 2 indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni :

1. Indikator kinerja kesatu target pada Triwulan I tahun 2021 yakni terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu sebesar 20,45% telah tercapai dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Website Tahun ke-N}}{\text{Jumlah Target Website Tahun ke-N}} \times 100\% \Rightarrow \frac{9}{44} \times 100\% = 20{,}45\%$$

2. Indikator kinerja kedua, ditargetkan pada Triwulan IV, sehingga pada Triwulan I ini tidak terdapat target dan capaian kinerja.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Bidang Aplikasi Informatika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK yang terpadu.	1. Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu	20%	20,45%	100%
	2. Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Bidang Aplikasi Informatika Tahun 2020 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK yang terpadu.	1. Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa	1.020.651.200	141.339.260	13,85%	20%	20,45%	100%	86,15%
		2. Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	185.582.000	9.324.000	5,02%	-	-	-	-
	1. Program Aplikasi Informatika		1.185.057.200	1.123.163.631	94,78%	20%	20,45%	100%	86,15%
	2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		185.582.000	9.324.000	5,02%	-	-	-	-

Capaian target kinerja indikator kesatu sudah memenuhi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan I sedangkan realisasi anggaran masih kecil yang disebabkan oleh jadwal anggaran kas pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi anggaran mengacu pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang penerbitannya setelah penyerapan anggaran. indikator kedua yang ditargetkan tercapai di Triwulanan IV, terus dilakukan upaya pencapaian dengan dukungan anggaran sebagaimana yang sudah tercantum dalam DPA Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2021.

Capaian penyerapan anggaran di Triwulanan I tahun anggaran 2021 tersebut bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja Triwulanan IV tahun anggaran 2021.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Bidang Aplikasi Informatika terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu	a. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan fitur website perangkat daerah. b. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait. c. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo.	Dilakukan mulai awal Januari s.d. Maret 2021.

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	a. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait. b. Aktif berkoordinasi dengan BPS Lumajang dan Bidang Data dan Statistik Kominfo Prov Jatim. c. Mengembangkan portal satu data Lumajang yang diintegrasikan dengan website perangkat daerah dan sistem lainnya	Dilakukan mulai awal April s.d. Desember 2021.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
3. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim dan BPS Lumajang.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan portal satu data Kabupaten Lumajang.
5. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan dan vendor-vendor bidang TIK.
6. Menyelenggarakan Bimtek bagi para admin sistem elektronik yang dikembangkan Dinas Kominfo Lumajang.
7. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan fitur website perangkat daerah dan sistem lainnya yang terkait integrasi sistem.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2019 tentang Master Plan Pengembangan Smart City Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Lumajang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan pada Triwulanan I telah dicapai 100%.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
   a. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan fitur website perangkat daerah.
   b. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait.
   c. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo.

Lumajang, 12 April 2021

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

YOGA PRATOMO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19780910 199802 1 001

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

DEWI SAWITRI, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19800813 200501 2 016

Laporan Kinerja (LKJ)
Triwulan I 2021

Seksi Layanan Data dan Statistik

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai salah satu kelas jabatan pada Eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Layanan Data dan Statistik merupakan salah satu Seksi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika . Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 12 ayat 3 telah diamanatkan bahwa tugas Seksi Layanan Data dan Statistik adalah sebagai berikut :

a. mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan data dan statistik sektoral;
b. menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan layanan data dan statistik sektoral;
c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan layanan data dan statistik sektoral;
d. melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan analisa data statistik sektoral ;
e. membangun metadata statistik sektoral;
f. melaksanakan diseminasi data statistik sektoral;

g. memantau,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan layanan data dan statistik sektoral;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Layanan Data dan Statistik dengan Kepala Bidang Aptika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Seksi Layanan Data dan Statistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	24 Bidang Data
2.	Meningkatnya jumlah SDM Pemerintah Daerah yang dibina	Jumlah SDM yang dibina	80 orang
3.	Meningkatnya jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	24 data

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dari 3 indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni :

1. Indikator kinerja kesatu target pada Triwulan I tahun 2021 yakni Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan sudah tercapai 6 bidang data dengan rincian sebagai berikut :
    - Bidang Sosial;
    - Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - Bidang Pertanian;
    - Bidang Perdagangan;
    - Bidang Kelautan dan Perikanan;
    - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Indikator kinerja kedua target pada Triwulan I tahun 2021 yakni Jumlah SDM yang dibina sudah mencapai target 20 orang (100%)
3. Indikator kinerja ketiga target pada Triwulan I tahun 2021 yakni Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia sudah mencapai target 1 metadata yaitu Laporan Bulanan Diseminasi Informasi Sektor Komunikasi dan Informatika

Berikut tabel Capaian Kinerja Seksi Layanan Data dan Statistik :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Layanan Data dan Statistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	6 Bidang Data	6 Bidang Data	100%
2.	Meningkatnya jumlah SDM Pemerintah Daerah yang dibina	Jumlah SDM yang dibina	20 orang	20 Orang	100%
3.	Meningkatnya jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	1 data	1 data	100%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Layanan Data dan Statistik Tahun 2021 - Triwulan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	44.338.000	759.000	1,71%	6 Bidang Data	6 Bidang Data	100%	98,29%
2	Meningkatnya jumlah SDM Pemerintah Daerah yang dibina	Jumlah SDM yang dibina	9.000.000	741.000	8,23%	20 orang	20 Orang	100%	91,77%
3	Meningkatnya jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	132.244.000	7.824.000	5,92%	1 data	1 data	100%	94,08%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi Layanan Data dan Statistik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	a. Berkoordinasi dengan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika b. Berkoordinasi dengan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa c. Penyusunan Buku Laporan Diseminasi Informasi Sektor Komunikasi dan Informatika	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021.
2	Jumlah SDM yang dibina	Melaksanakan rapat untuk optimalisasi penggunaan Portal Satu Data Kabupaten Lumajang dan penyusunan buku saku statistik sektoral	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021.
3	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	a. Aktif melakukan koordinasi dengan produsen data terkait data statistik sektoral b. Aktif berkoordinasi dengan BPS dan Kominfo Provinsi Jawa Timur	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk menghimpun dan diseminasi data statistik sektoral.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data yang tekumpul dari masing-masing OPD
4. Aktif melakukan koordinasi dengan produsen data terkait data statistik sektoral
5. Aktif berkoordinasi dengan BPS dan Kominfo Provinsi Jawa Timur

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Layanan Data dan Statistik berdasarkan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari target kinerja yang ditetapkan pada triwulan I nilai capaiannya sebagai berikut :
   a. Meningkatnya jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan : 1,71%.
   b. Meningkatnya jumlah SDM Pemerintah Daerah yang dibina : 8,23%
   c. Meningkatnya jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia : 5,92%
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain :
   a. Aktif melakukan koordinasi dengan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa terkait data sektor komunikasi dan informatika
   b. Melaksanakan rapat untuk optimalisasi penggunaan Portal Satu Data Kabupaten Lumajang dan penyusunan buku saku statistik sektoral
   c. Aktif melakukan koordinasi dengan produsen data, BPS dan Kominfo Provinsi Jawa Timur terkait data statistik sektoral
4. Pelaksanaan tugas Seksi Layanan Data dan Statistik juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 5 April 2021

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG APTIKA

DEWI SAWITRI, S.Kom
Penata Tk.I
NIP. 19800813 200501 1 016

KEPALA SEKSI
LAYANAN DATA DAN STATISTIK

JONI HIDAYAT, SE
Penata
NIP. 19740618 199403 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Seksi Pemberdayaan Informatika sebagai salah satu kelas jabatan pada Eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Seksi Pemberdayaan Informatika dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Pemberdayaan Informatika merupakan salah satu Seksi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 12 ayat 2 telah diamanatkan bahwa tugas Pemberdayaan Informatika adalah sebagai berikut :

a. mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Informatika;
b. menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan Pemberdayaan Informatika;
c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan Pemberdayaan Informatika;
d. menyelenggarakan layanan pengelolaan *domain* dan *sub domain* Pemerintah Kabupaten;

e. menyelenggarakan *Government Chief Information Officer* implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten;
f. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
g. melaksanakan analisis dan kajian implementasi teknologi informasi dan komunikasi pemerintah;
h. melaksanakan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik;
i. melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
j. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Informatika;
k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika**.**

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Seksi Pemberdayaan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengguna SPBE yang dibina	Jumlah website / aplikasi yang dipantau secara optimal	44 website
2.	Meningkatnya jumlah peserta pertemuan forum TIK	Jumlah peserta forum TIK	80 orang
3.	Meningkatnya jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	80 orang
4.	Meningkatnya jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	Jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	45 website / aplikasi
5.	Meningkatnya jumlah peserta forum smart city	Jumlah peserta forum smart city	80 orang

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2021, ada 5 indikator kinerja yang telah tercapai, yaitu :

1. Indikator kinerja kesatu target pada Triwulan I tahun 2021 telah tercapai 9 website Perangkat Daerah. Adapun website perangkat daerah tersebut :
   a. http://diskominfo.lumajangkab.go.id
   b. https://dispenduk.lumajangkab.go.id
   c. https://bappeda.lumajangkab.go.id
   d. https://dinsos.lumajangkab.go.id
   e. https://disparbud.lumajangkab.go.id
   f. https://disnaker.lumajangkab.go.id
   g. https://dpkp.lumajangkab.go.id
   h. https://dispora.lumajangkab.go.id
   i. https://dinkes.lumajangkab.go.id
2. Indikator kinerja kedua ditargetkan pada Triwulan II dan III, sehingga pada triwulan I ini tidak terdapat target dan capaian kinerja.
3. Indikator kinerja ketiga ditargetkan pada Triwulan I tahun 2021 sebanyak 20 orang. Pada pelaksanaannya melebihi target yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Perangkat Daerah	Jumlah peserta
1	Workshop Integrasi Website PPID	BPRD, BKD, Dinas Pertanian	5 orang
2	Rapat Koordinasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)	BPKD, BKD, DPMPTSP, Bappeda, Bag. Tapem Setda, Bag. Hukum Setda	8 orang
3	Rapat Koordinasi Implementasi SPBE	Diskominfo, Bag. Hukum Setda, Bag. Organisasi Setda, Bag. Tapem Setda, BPRD, BKD, BPBJ Setda, Bappeda, BPKD	16 orang
		Jumlah	**29 orang**

4. Indikator kinerja keempat ditargetkan pada Triwulan I tahun 2021 telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :
   a. http://labruklor-lumajang.lumajangkab.go.id
   b. http://sumberwuluh-candipuro.lumajangkab.go.id
   c. http://sarikemuning-senduro.lumajangkab.go.id
   d. http://kutorenon-sukodono.lumajangkab.go.id

e. http://tempehlor-tempeh.lumajangkab.go.id
f. http://sumbersari-rowokangkung.lumajangkab.go.id
g. http://ranubedali-ranuyoso.lumajangkab.go.id
h. http://jatigono-kunir.lumajangkab.go.id
i. http://kraton-yosowilangun.lumajangkab.go.id

5. Indikator kinerja kelima ditargetkan pada Triwulan I dan II tahun 2021. Untuk triwulan I terkendala refocusing anggaran yang mengakibatkan anggaran tidak dapat diserap.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Informatika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pengguna SPBE yang dibina	Jumlah website / aplikasi yang dipantau secara optimal	9 website	9 website	100%
Meningkatnya jumlah peserta pertemuan forum TIK	Jumlah peserta forum TIK	-	-	-
Meningkatnya jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	20 orang	29 orang	145%
Meningkatnya jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	Jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	9 website / aplikasi	9 website / aplikasi	100%
Meningkatnya jumlah peserta forum smart city	Jumlah peserta forum smart city	20 orang	0	0%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Pemberdayaan Informatika Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya pengguna SPBE yang dibina	Jumlah website / aplikasi yang dipantau secara optimal	19.824.000	3.304.000	16,67 %	9 website	9 website	100%	83,33 %
2	Meningkatnya jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	9.000.000	1.007.760	11,20 %	20 orang	29 orang	145%	133,8 %
3	Meningkatnya jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	Jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	263.400.000	17.100.000	8,42 %	9 website / aplikasi	9 website /aplikasi	100%	91,58 %

4	Meningkatnya jumlah peserta forum smart city	Jumlah peserta forum smart city	203.000.000	0	0 %	80 orang	20 orang	0	0 %

Sisa anggaran pada kegiatan yang target kinerjanya yang telah tercapai, tidak lantas disimpulkan bahwa anggaran tersebut tidak akan terserap lagi, karena proses penyerapan atas anggaran pada kegiatan tersebut masih tetap berjalan. Untuk kegiatan pemberdayaan informatika misalnya, kegiatan ini masih tetap akan berjalan, meskipun akan didahului dengan perubahan belanja, mengingat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD masih dapat terjadi.

Penyerapan anggaran pada Seksi pemberdayaan informatika masih relatif kecil dikarenakan realisasi anggaran mengacu pada penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang penerbitannya setelah penyerapan anggaran.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di triwulanan I tahun anggaran 2021, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi pemberdayaan informatika terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Jumlah website / aplikasi yang dipantau secara optimal	Memantau untuk mengoptimalkan website Perangkat Daerah	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021
2	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Mengadakan rapat koordinasi atau FGD bagi Perangkat Daerah, kelurahan, dan desa	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021

3	Jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	Melaksanakan pengembangan fitur website Perangkat Daerah	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021

Terkait dengan target kinerja yang belum tercapai, maka hal tersebut di triwulanan I belum dapat terealisasi karena perencanaan atas pelaksanaan kegiatan baru dapat dijalankan di triwulanan II, III, ataupun IV. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target tersebut oleh Seksi pemberdayaan informatika sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Jumlah website / aplikasi yang dipantau secara optimal	Memantau untuk mengoptimalkan website Perangkat Daerah	Dilakukan pada bulan April – Desember 2021
2	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Mengadakan rapat koordinasi atau FGD bagi Perangkat Daerah, kelurahan, dan desa	Dilakukan pada bulan April – Desember 2021
3	Jumlah website / aplikasi yang dikembangkan	- Melaksanakan pengembangan fitur website Perangkat Daerah - Berkoordinasi dengan Tim Konsultan	Dilakukan pada bulan April – Desember 2021
4	Jumlah peserta forum smart city	- Berkoordinasi dengan Tim Konsultan - Mengadakan rapat koordinasi atau FGD bagi Perangkat Daerah	Dilakukan pada bulan Maret – Juni 2021

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Mengadakan rapat koordinasi atau FGD bagi Perangkat Daerah, kelurahan, dan desa.
3. Berkoordinasi dengan Tim Konsultan dan penyedia bidang TIK.
4. Mengoptimalkan website Perangkat Daerah.
5. Melaksanakan pengembangan peningkatan fitur website perangkat daerah.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan segera diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain ……

……

……

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan fungsi Seksi Pemberdayaan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada triwulan I :
   a. Nilai capaian untuk Indikator Kinerja “Jumlah website / aplikasi yang dipantau secara optimal” sebesar 16,67%.
   b. Nilai capaian untuk Indikator Kinerja “Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik” sebesar 11,20%.
   c. Nilai capaian untuk Indikator Kinerja “Jumlah website / aplikasi yang dikembangkan” sebesar 8,42%.
   d. Nilai capaian untuk Indikator Kinerja “Jumlah peserta forum smart city” sebesar 0%

   dikarenakan pada awal bulan Januari sampai dengan Maret masih diberlakukan kebijakan terkait pandemi covid19, sehingga capaian anggaran tidak maksimal. Pada pertengahan bulan Maret muncul Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, yang berdasar pada :
   a. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah
   b. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 910/870/Keuda tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pemanfaatan Sisa Dana BOK Tambahan TA 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang harus melakukan langkah-langkah seperti refocusing anggaran yang mengakibatkan anggaran pada Perangkat Daerah tidak dapat terserap.

2. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
   a. Menyelenggarakan FGD (Forum Group Discussion) kepada Perangkat Daerah, kelurahan dan desa;
   b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah secara aktif.
   c. Melaksanakan pengembangan fitur website perangkat daerah.
   d. Berkoordinasi dengan Tim Konsultan dan penyedia bidang TIK

Mengetahui, ATASAN LANGSUNG	Lumajang, 05 April 2021
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN INFORMATIKA
DEWI SAWITRI, S. Kom Penata Tk.I NIP. 19800813 200501 2 016	**YULI FIRDIYANTI, A. Md** Penata Muda Tk. I NIP. 19810125 200501 2 010

Laporan Kinerja (LKJ)
Triwulan I 2021

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Alun-alun utara No.7 telp. 0334-8780990, fax.0334-887461-885344
E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika merupakan salah satu Seksi yang ada di Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal pasal 12 ayat 1 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan informatika;
2. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan informatika;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pengelolaan dan pengembangan informatika;
4. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
5. Menyelenggarakan layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah;
6. Melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
7. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika;
8. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	Jumlah nama domain pemrintah daerah yang terdaftar	1 domain
2	Meningkatnya jumlah domain dan subdomain yang dipantau	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1 domain dan 264 subdomain
3	Meningkatnya jumlah pusat data pemerintah yang dikelola	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 pusat data

2.2. CAPAIAN KINERJA

Di tahun 2021 ini domain yang didaftarkan sejumlah 1 (satu) nama domain yaitu lumajangkab.go.id pada bulan februari 2021.

Dalam kurun waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, sudah dilakukan pemantauan capaian 66 website subdomain perangkat daerah, kelurahan dan desa yang sudah menjadi subdomain lumajangkab.go.id, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Alamat Website Domain dan Subdomain
1	Diskominfo	Lumajangkab.go.id (Domain)
2	Diskominfo	Mail.lumajangkab.go.id

3	Diskominfo	Mrtg.lumajangkab.go.id
4	Diskominfo	Simedsos.lumajangkab.go.id
5	Diskominfo	e-gallery.lumajangkab.go.id
6	Diskominfo	Laporlumajang.lumajangkab.go.id
7	Diskominfo	Data.lumajangkab.go.id
8	Diskominfo	Portalberita.lumajangkab.go.id
9	Diskominfo	Ppid.lumajangkab.go.id
10	DPUTR	Simtaru.lumajangkab.go.id
11	Bagian LPBJ	Lpse.lumajangkab.go.id
12	Dinas Kesehatan	Dinkes.lumajangkab.go.id
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bpkd.lumajangkab.go.id
14	Bagian Hukum	Jdih.lumajangkab.go.id
15	Dinas Perdagangan	Dindag.lumajangkab.go.id
16	Bagian LPBJ	Smep.lumajangkab.go.id
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bpbd.lumajangkab.go.id
18	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.lumajangkab.go.id
19	Dinas Ketahanan Pangan	Dkp.lumajangkab.go.id
20	Dinas Pertanian	Pertanian.lumajangkab.go.id
21	Badan Kepegawaian Daerah	Bkd.lumajangkab.go.id
22	Dinas Kesehatan	Rsudharyoto.lumajangkab.go.id
23	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Bprd.lumajangkab.go.id
24	Badan Kepegawaian Daerah	Simak.bkd.lumajangkab.go.id
25	Dinas Kesehatan	rsudpasirian.lumajangkab.go.id
26	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bappeda.lumajangkab.go.id
27	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.lumajangkab.go.id
28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	disparbud.lumajangkab.go.id
29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	dispenduk.lumajangkab.go.id
30	Diskominfo	diskominfo.lumajangkab.go.id
31	Kecamatan Tempursari	tempursari.lumajangkab.go.id
32	Kecamatan Gucialit	gucialit.lumajangkab.go.id
33	Kecamatan Pronojiwo	pronojiwo.lumajangkab.go.id
34	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.lumajangkab.go.id
35	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	simin.lumajangkab.go.id
36	Dinas Sosial	dinsos.lumajangkab.go.id
37	PKK	pkk.lumajangkab.go.id
38	DPMPTSP	dpmptsp.lumajangkab.go.id

39	Diskominfo	e-office.lumajangkab.go.id
40	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispora.lumajangkab.go.id
41	Diskominfo	sakip.lumajangkab.go.id
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	dpkp.lumajangkab.go.id
43	Dinas Kesehatan	Silugaspsc119.lumajangkab.go.id
44	Dinas Kesehatan	simpul.lumajangkab.go.id
45	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	sikat.lumajangkab.go.id
46	Kecamatan Kunir	kunir.lumajangkab.go.id
47	Kecamatan Candipuro	candipuro.lumajangkab.go.id
48	Kecamatan Pasirian	pasirian.lumajangkab.go.id
49	Kecamatan Tempeh	tempeh.lumajangkab.go.id
50	Kecamatan Jatiroto	jatiroto.lumajangkab.go.id
51	Kecamatan Padang	padang.lumajangkab.go.id
52	Kecamatan Sukodono	sukodono.lumajangkab.go.id
53	Kecamatan Senduro	senduro.lumajangkab.go.id
54	Kecamatan Pasrujambe	pasrujambe.lumajangkab.go.id
55	Kecamatan Lumajang	lumajang.lumajangkab.go.id
56	Kecamatan Yosowilangun	yosowilangun.lumajangkab.go.id
57	Kecamatan Tekung	tekung.lumajangkab.go.id
58	Kecamatan Sumbersuko	sumbersuko.lumajangkab.go.id
59	Kecamatan Kedungjajang	kedungjajang.lumajangkab.go.id
60	Kecamatan Klakah	klakah.lumajangkab.go.id
61	Kecamatan Ranuyoso	ranuyoso.lumajangkab.go.id
62	Kecamatan Randuagung	randuagung.lumajangkab.go.id
63	Kelurahan Ditotrunan (Kec. Lumajang)	ditotrunan.lumajangkab.go.id
64	Kelurahan Jogotrunan (Kec. Lumajang)	jogotrunan.lumajangkab.go.id
65	Kelurahan Rogotrunan (Kec. Lumajang)	rogotrunan.lumajangkab.go.id
66	Kelurahan Jogoyudan (Kec. Lumajang)	jogoyudan.lumajangkab.go.id

Berikut tabel capaian kinerja seksi pengelolaan dan pengembangan informatika:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	1 domain	1 domain	100%
2. Meningkatnya jumlah domain dan subdomain yang dipantau	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1 domain dan 66 subdomain	1 domain dan 66 subdomain	100%
3. Meningkatnya jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	-	-	-

Target jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar di triwulan I sudah dilaksanakan, dengan capaian target 100% pada 1 (satu) nama domain yang didaftarkan melalui situs resmi pengelola nama domain pemerintahan.

untuk pengelolaan pusat data tidak ada target untuk dicapai dan penyerapan anggaran untuk kegiatan rutin pengelolaan, sedangkan untuk pengembangan pusat data mengalami kendala peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur karena tidak adanya anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam mewujudkan pencapaian atas target kinerja tersebut, difokuskan pada pemantauan web subdomain perangkat daerah sebanyak 66 websubdomain. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika Tahun 2021 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	Jumlah nama domain pemrintah daerah yang terdaftar.	150.000	55.000	36,67%	1 Domain	1 Domain	100%	63,33%
2	Meningkatnya jumlah domain dan subdomain yang dipantau	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	14.160.000	2.360.000	16,67%	1 Domain dan 66 Subdomain	1 Domain dan 66 Subdomain	100%	83,33%
3	Meningkatnya jumlah pusat data pemerintah yang dikelola	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	508.117.200	117.512.500	23,13%	-	-	-	-

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar.	• Melakukan pendaftaran ke pengelolan nama domain Indonesia (PANDI) melalui online	Dilakukan pada bulan Februari 2021.
2	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang mengajukan permohonan subdomain website b. Melakukan pengujian terhadap web atau aplikasi perangkat daerah yang diajukan menjadi subdomain c. Melakukan monitoring web subdomain perangkat daerah yang sudah terintegrasi	Dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Belum Tercapai ditahun anggaran berjalan

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
3	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	• Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pusat data pemerintah	Dilakukan pada April – Desember 2021

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melaksanakan target kinerja pada triwulan berikutnya ditahun anggaran berjalan.
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah, kelurahan dan desa.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain ……

……

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya pada triwulan I.
2. Kegiatan di triwulan I difokuskan untuk pemantauan web subdomain dan melakukan pengujian keamanan informasi website perangkat daerah yang akan di integrasikan dengan web lumajangkab.go.id
3. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari target kinerja yang ditetapkan pada triwulan I terdapat target yang tidak bisa dicapai, karena ditargetkan pada triwulan IV pada anggaran tahun berjalan dan adanya instruksi refocusing anggaran pada awal bulan maret 2021, sehingga capaian anggaran dan kegiatan dalam seksi pengelolaan dan pengembangan informatika tidak maksimal.
4. Pencapaian atas target yang belum akan dipenuhi pada capaian triwulan selanjutnya ditahun anggaran berjalan.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

DEWI SAWITRI, S. Kom
Penata Tk.I
NIP. 19800813 200501 2 016

Lumajang, 5 April 2021

KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN INFORMATIKA

EKO PURWANTO, A.Md
Penata
NIP. 19810817 200501 1 011